

BAB VII

KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Seperti telah kita ketahui, pendidikan adalah faktor penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Pendidikan telah dikenal sejak dahulu kala oleh nenek moyang kita meskipun dengan sistem yang paling sederhana. Sejalan dengan lajunya sistem perekonomian di Indonesia, perbaikan-perbaikan dalam sistem pendidikan pun senantiasa diupayakan demi terciptanya cita-cita bangsa dan negara yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Dasar-dasar kelembagaan pendidikan bila kita teliti mulai dari masyarakat dan kebudayaan yang sederhana, maka lembaga-lembaga pendidikan itu meliputi :

1. Keluarga atau rumah tangga atau orang tua, sebagaimana wujud kehidupan sosial yang asasi sebagai unit kehidupan bersama manusia yang terkecil. Keluarga adalah lembaga kehidupan yang asasi dan alamiah, yang pasti secara alamiah dialami oleh kehidupan seorang manusia.
2. Masyarakat yakni lingkungan sosial yang ada disekitar keluarga itu : kampung, desa, marga ataupun pulau.

Kedua bentuk lembaga tersebut kemudian mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan kebudayaan manusia. Kemudian kita mengenal susunan

kelembagaan seperti yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan modern dewasa ini. Artinya masyarakat yang lebih maju mempunyai tata susunan kelembagaan yang lebih rumit (kompleks). Karena masyarakat dan kebudayaan yang lebih maju itu mengadakan pembagian tugas atau tanggung jawab fungsi-fungsi kehidupan.

Untuk memahami tata kehidupan pendidikan hendaknya kita memperhatikan tata kehidupan manusia secara mendasar dan menyeluruh. Secara sederhana kita menemukan kenyataan, bahwa manusia dilahirkan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sebagai unit kehidupan manusia ada dan dipengaruhi dalam antar hubungan dan antar aksi dengan masyarakatnya. Karena itu keluarga merupakan bentuk mikro suatu masyarakat. Sedangkan bentuk makro suatu masyarakat adalah negara.

Antara keduanya ada pula subsistem yang diciptakan oleh kebudayaan suatu masyarakat menurut kebutuhan dan perkembangannya. Subsistem ini ialah lembaga pendidikan yang dikenal sebagai sekolah (TK, SD, SLTA dan PT) sebagai lembaga pendidikan formal.

Tiap pribadi manusia akan selalu berada dan mengalami perkembangan dalam ketiga lembaga tersebut (keluarga, sekolah dan masyarakat). Berdasarkan realitas dan peranan ketiga lembaga tersebut, maka ahli pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan ini sebagai tri pusat pendidikan. Artinya, tiga

pusat pendidikan yang secara bertahap dan terpadu mengemban tanggung jawab pendidikan bagi generasi mudanya. Kemudian asas ini dijadikan kebijakan negara kita yang termuat dalam GBHN yang menetapkan prinsip pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Orientasi kelembagaan seumur hidup tri pusat pendidikan demikian, bersifat wajar (alamiah, sesuai dengan kenyataan dalam tata kebudayaan manusia). Karena itu wajarlah pula potensi tripusat ini ditingkatkan daya gunanya secara fungsional.

1. Lembaga keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terbentuk berdasarkan suka rela dan cinta yang asasi antara dua subyek manusia (suami-istri). Berdasarkan asas cinta yang asasi inilah lahirlah anak sebagai generasi penerus. Keluarga dengan cinta kasih dan pengabdian yang luhur membina kehidupan sang anak. Oleh Ki Hajar Dewantara dikatakan supaya orang tua (sebagai pendidik) mengabdikan kepada anak. Motivasi pengabdian keluarga (orang tua) ini semata-mata demi cinta kasih yang kodrati. Di dalam

suasana cinta dan kemesraan inilah proses pendidikan berlangsung seumur anak itu dalam tanggung jawab keluarga.

2. Lembaga Sekolah

Ketika anak berumur 4-6 tahun, ia dipercaya oleh keluarganya untuk mendidik oleh lembaga pendidikan (sekolah), seperti TK-SD. Lembaga sekolah ini meneruskan pembinaan yang telah diletakkan dasar-dasarnya dalam lingkungan keluarga. Sekolah menerima tanggung jawab pendidikan berdasarkan kepercayaan keluarga. Sedangkan yang dimaksud sekolah itu sendiri adalah satuan/unit sosial/lembaga sosial yang kekhususan tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Ini jika semua sekolah dipandang sebagai kesatuan. Menurut M. Sastropratedja, sekolah ialah

1. Bangunan/lembaga untuk belajar dan memberi pelajaran.

2. Waktu/pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.

3. Usaha menuntut pelajaran.

3. Lembaga Masyarakat.

a. Masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk kata kehidupan sosial dengan tat-nilai dan tata-budaya sendiri. Dalam arti kata ini masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk (plural: suku, agama, kegiatan-kerja, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dsb).

Manusia berada dalam multi kompleks anatr hubungan dan antar aksi di dalam masyarakat itu.

- b. Masyarakat dalam arti organisasi kehidupan bersama, yang secara makro ialah tata-pemerintahan. Masyarakat dalam makna inilah lembaga atau perwujudan subyek pengelola dan kepemimpinan bersama (berdasarkan asas demokrasi). Artinya masyarakat dengan fungsi pengelola menerima kepercayaan dan tanggung jawabnya oleh, dari dan untuk masyarakat.

Dalam kedua makna inilah tiap pribadi manusia, sejak kanak-kanak hingga dewasa terlihat sebagai warga-masyarakat dan warganegara. Tiap warga masyarakat dan warganegara. Tiap warga masyarakat dan warga negara mengabdikan dan setia kepada masyarakatnya. Bahkan mereka didik oleh dan untuk masyarakat bangsanya. Masyarakat sebagai lembaga kehidupan inilah yang memberi sifat-sifat dasar suatu pendidikan nasional.

Secara mendasar pola tripusat ini selalu merupakan komponen atau subsistem yang dialami manusia dalam kehidupannya. Dengan demikian tripusat merupakan realitas kehidupan budaya manusia yang cukup universal. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam tata kehidupan dan sistem pendidikan nasional suatu bangsa, ialah bagaimana mereka secara formal & praktis memberikan hak dan tanggung jawab kepada masing-masing lembaga pendidikan

tersebut. Artinya, ada bangsa/ negara yang memberikan hak dan tanggung jawab besar kepada keluarga dibandingkan dengan kepada masyarakat (negara) dan sekolah. Ada pula bangsa atau negara yang memberikan hak tanggung jawab paling besar kepada peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan dibandingkan dengan keluarga atau masyarakat.

Setiap lembaga tentunya punya tanggung jawab seperti juga lembaga pendidikan di atas. Dari pola analisa tanggung jawab keluarga atas anaknya, sebagai generasi muda yang sekaligus sebagai generasi penerus, kita dapat menjabarkan bagaimana rasional pola tanggung jawab itu dalam ketiga lembaga pendidikan (tripusat).

1. Tanggung Jawab Keluarga

Dasar-dasar tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan anaknya meliputi :

- a. Dorongan/ motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Cinta kasih ini mendorong sikap dan tidakan rela menerima tanggung jawab dan mengabdikan hidupnya untuk sang anak.
- b. Dorongan/ motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai religius spritual yang dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa dan agama masing-masing di samping di

dorong oleh kesadaran memelihara martabat dan kehormatan keluarga.

- c. Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa dan negaranya, bahkan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini merupakan perwujudan kesadaran tanggung jawab kekeluargaan yang diikuti oleh darah keturunan dan kesatuan keyakinan.
2. Tanggung Jawab Sekolah
- Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menerima fungsi pendidikan berdasarkan asas-asas tanggung jawab yang meliputi :
- a. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut undang-undang pendidikan (ketentuan-ketentuan yang berlaku).
 - b. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi tujuan dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepadanya oleh masyarakat dan negara.
 - c. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional pengelola dan pelaksana pendidikan (para guru, pendidik) yang menerima ketetapan ini berdasarkan ketentuan-ketentuan jabatannya. Tanggung jawab ini merupakan pelimpahan tanggung jawab dan

kepercayaan orang tua (masyarakat) kepada sekolah dari para guru.

3. Tanggung jawab Pemerintah
- Pemerintah, di tingkat pusat dan daerah merupakan perwujudan masyarakat bangsa dan negara. Pemerintah mengemban kepercayaan masyarakat untuk mengelola keseluruhan segi kehidupan bangsa (dalam bidang pendidikan). Tanggung jawab ini meliputi :
- a. Tanggung jawab kenegaraan dan kemasyarakatan yang wujudnya berupa motivasi untuk melestarikan tegaknya kemerdekaan bangsa dan negara. Tanggung jawab ini mencakup pembinaan kesadaran nasional dan berkonstitusi.
 - b. Tanggung jawab struktural kelembagaan yakni sebagai wujud tata kelembagaan negara dengan masing-masing aspek dan tanggung jawabnya. Dapat juga diartikan sebagai tanggung jawab yuridis-konstitusional.

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan itu oleh lembaga-lembaga yang meliputi :

- (1) Lembaga keluarga
- (2) Lembaga sekolah
- (3) Lembaga masyarakat
- (4) Lembaga keagamaan
- (5) Lembaga kenegaraan (Pemerintah).

Kita akan melihat sekolah sebagai lembaga sosial. Sekolah ialah suatu

satuan atau unit sosial/ lembaga sosial yang kekhususannya atau tugasnya ialah melaksanakan proses pendidikan. Disini sekolah mempunyai fungsi yang berkenaan langsung dengan kepentingan umum yaitu melayani generasi muda didalam masyarakat. Tentu saja dalam hal ini sekolah adalah bentuk pendidikan formal yang mempunyai beberapa unsur yaitu :

1. Murid.
2. Guru
3. Kurikulum
4. Gedung serta sarana lain

Adapun murid, guru, kurikulum merupakan unsur yang paling mutlak. Karena sekolah dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat maka unsur-unsur tersebut di atas senantiasa berhubungan dengan masyarakat. Di samping unsur-unsur, sekolah juga memiliki beberapa fungsi :

1. Fungsi selektif/ evaluatif
Fungsi ini berhubungan dengan pengetahuan dan kebudayaan. Dimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu seleksi/ dievaluasi apakah kebudayaan-kebudayaan tersebut sesuai dengan pendidikan.
2. Fungsi inovatif
Fungsi ini muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat akan [emenuhan kebutuhan semakin meningkat sehingga perlu diadakan inovasi. (contoh inovasi yang telah dilakukan pemerintah antara lain. pRoyek

perintis, sekolah pembangunan pada 8 buah IKIP, kuliah nyata, dsb.).

3. Fungsi konservatif

Fungsi yang berhubungan erat dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sekolah-sekolah sangat dibutuhkan supaya pendidikan lebih sistematis dan efisien. Akan tetapi kita juga harus ingat proses pendidikan tidak hanya diperoleh disekolah, karena pendidikan memiliki 3 bentuk yaitu :

1. Pendidikan formal

Yaitu pendidikan yang mempunyai bentuk organisasi tertentu misalnya sekolah.

2. Pendidikan non formal

Yaitu pendidikan yang mempunyai organisasi tetapi tidak seperti sekolah, contohnya organisasi oleh raga, kepemudaan, pendidikan masyarakat dsb.

3. Pendidikan informal

Yaitu pendidikan yang diperoleh seseorang dirumah keluarga dan masyarakat. Dalam wujud pergaulan sehari-hari tanpa ada organisasi tertentu.